



RENCANA KONTIJENSI MENGHADAPI KEMUNGKINAN ANCAMAN BENCANA TANAH LONGSOR



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	:	i
DAFTAR GAMBAR	:	ii
DAFTAR TABEL	:	iii
BAB I	: PENDAHULUAN	
	1. DASAR HUKUM	1
	2. LATAR BELAKANG	3
	3. GAMBARAN UMUM	5
	4. PENGERTIAN-PENGERTIAN	12
	5. MAKSUD DAN TUJUAN	14
	6. TAHAPAN PENYUSUNAN KONTIJENSI	14
	7. PERENCANAAN PROGRAM	15
	8. AKTIVASI RENCANA KONTIJENSI	17
	9. POTENSI KEJADIAN BENCANA	17
BAB II	: PENILAIAN BAHAYA DAN PENENTUAN KEJADIAN	
	1. PENILAIAN BAHAYA	19
	2. PENENTUAN KEJADIAN	20
BAB III	: PENGEMBANGAN SKENARIO	
	1. PENDUDUK	22
	2. FASILITAS KRITIS	23
	3. FASILITAS UMUM	25
BAB IV	: KEBIJAKAN DAN STRATEGI	28
BAB V	: PERENCANAAN KLUSTER	
	1. KLUSTER MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN	29
	2. KLUSTER KESEHATAN	32
	3. KLUSTER PENYELAMATAN DAN PERLINDUNGAN	35
	4. KLUSTER TRANSPORTASI	37
	5. KLUSTER LOGISTIK	39
	6. KLUSTER SARANA PRASARANA	41
BAB VI	: RENCANA TINDAK LANJUT	45
BAB VII	: PENUTUP	46
LAMPIRAN	: Lampiran I : Parameter Pengakhiran Status Darurat Bencana	47
	Lampiran II : Profil Lembaga/Instansi Terkait Dalam Penyusunan Rencana Kontijensi	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Administrasi Kabupaten Solok	6
Gambar 2.	Silabus Proses Perencanaan Kontijensi	16
Gambar 3.	Peta Rawan Bencana Longsor	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kecamatan, Nagari dan Jorong di Kabupaten Solok	6
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Solok	8
Tabel 3. Jumlah Penduduk Potensi longsor	8
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kelompok Usia Rentan Potensi Longsor	9
Tabel 5. Jumlah Penduduk Penyandang Cacat	9
Tabel 6. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Pekerjaan	11
Tabel 7. Penilaian Bahaya	19
Tabel 8. Matrik Skala Tingkat Bahaya	20
Tabel 9. Kemiringan Kabupaten Solok	20
Tabel 10. Daerah Beresiko Bencana Longsor	22
Tabel 11. Dampak Longsor Terhadap Penduduk	23
Tabel 12. Jalan Yang Tidak Berfungsi	24
Tabel 13. Jembatan Yang Tidak Berfungsi	24
Tabel 14. Jaringan PLN yang Tidak Berfungsi	24
Tabel 15. Jaringan PDAM yang Tidak Berfungsi	25
Tabel 16. Sarana Kesehatan yang Tidak Berfungsi	25
Tabel 17. Pasar Tradisional yang Tidak Berfungsi	26
Tabel 18. Sekolah Yang Tidak Berfungsi	26
Tabel. 19 Rumah Ibadah yang Tidak Berfungsi	27
Tabel. 20 Gedung Pemerintahan yang Tidak Berfungsi	27
Tabel. 21 Kegiatan yang dilaksanakan pada Kluster Manajemen dan Pengendalian	30
Tabel. 22 Kebutuhan Personil dan Peralatan Kluster Manajemen dan Pengendalian	31
Tabel. 23 Kegiatan yang dilaksanakan pada Kluster Kesehatan	33
Tabel. 24 Kebutuhan Personil dan Peralatan Kluster Kesehatan	34
Tabel. 25 Kegiatan yang dilaksanakan pada Kluster Penyelamatan dan Perlindungan	36
Tabel. 26 Kebutuhan Personil dan Peralatan Kluster Penyelamatan dan Perlindungan	36
Tabel. 27 Kegiatan yang dilaksanakan pada Kluster Transportasi	38
Tabel. 28 Kebutuhan Personil dan Peralatan Kluster Transportasi	38
Tabel. 29 Kegiatan yang dilaksanakan pada Kluster Logistik	39
Tabel. 30 Kebutuhan Personil dan Peralatan Kluster Logistik	40
Tabel. 31 Kegiatan yang dilaksanakan pada Kluster Sarana dan Prasarana	42
Tabel. 32 Kebutuhan Personil dan Peralatan Kluster Sarana dan Prasarana	43
Tabel. 33. Rekapitulasi Kebutuhan	44

BAB I

PENDAHULUAN

1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2015.
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014.

17. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana.
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
27. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Tahun 2006 – 2025.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 – 2015.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
31. Peraturan Bupati Solok Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok Tahun 2013 – 2017.

2. LATAR BELAKANG

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Usaha, dan masyarakat untuk melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Rencana kontijensi yang merupakan rencana pada saat kondisi darurat merupakan salah satu rencana kesiapsiagaan menghadapi bencana. Hal tersebut termaktub di dalam Pasal 45 Ayat (1) dan (2) :

- 1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- 2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a) Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b) Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d) Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e) Penyiapan lokasi evakuasi;
 - f) Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;

Penjabaran dari UU No. 24 tahun 2007 diatas dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya pada Pasal 16 dan Pasal 17 :

Pasal 16 :

- 1) Pemerintah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- 2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi / lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD dalam bentuk :
 - a) Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b) Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d) Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana;
 - e) Penyiapan lokasi evakuasi
 - f) Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat; dan
 - g) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana;

- 3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan Masyarakat dan Lembaga Usaha.

Pasal 17 :

- 1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- 2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD serta Pemerintah Daerah

Kabupaten Solok dengan Ibukota di Arosuka terdiri dari 14 Kecamatan dengan 74 Nagari dan 414 Jorong. Kecamatan yang memiliki nagari terbanyak adalah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dan Kecamatan X Koto Diatas yang masing-masing memiliki 9 nagari, sedangkan kecamatan dengan jumlah nagari terkecil terdapat di Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Danau Kembar dan Kecamatan Junjung Sirih masing masing hanya memiliki 2 nagari.

Di Kabupaten Solok terdapat Gunung api yang masih aktif, yaitu Gunung Api Talang terletak sekitar 20 km sebelah selatan kota Solok puncaknya mencapai sekitar 2.597 m diatas permukaan laut atau 1.100 m diatas ketinggian dataran pos pengamatan. Secara geografis Gunung Api terletak pada 0° 58' 42,24" lintang selatan, 100° 40' 46,19" bujur timur.

Kondisi wilayah Kabupaten Solok dengan topografi yang berbukit bukit serta morfologi bergelombang disertai keadaan iklim yang kering mengakibatkan wilayah Solok juga berpotensi rawan bencana terutama yang berkaitan dengan iklim (bencana *hidrometeorologis*/klimatologis), yaitu, Tanah longsor, Banjir, Angin Ribut, Kekeringan, dan Kebakaran lahan, Kemungkinan terjadinya bencana, di Kabupaten Solok bisa disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia.

Hal yang sangat diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan Kontinjensi adalah bagaimana karakteristik bahaya ancaman dan kerentanan masyarakat serta pemerintahnya bisa diidentifikasi secara jelas dan terukur sehingga dapat diperkirakan kemungkinan-kemungkinan dampak buruk/risiko yang dialami Masyarakat dan Wilayah Kabupaten Solok, dan pada tahap selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman Rencana Operasionil Tanggap Darurat pada saat benar-benar terjadi bencana (saat darurat) bagi para pemangku kepentingan penanggulangan bencana di semua tingkatan. Pada saat tanggap darurat, semua sumber daya yang ada di Kabupaten Solok harus dapat dimobilisasi untuk memberikan perlindungan serta penyelamatan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.

Pengalaman masyarakat dan pemerintah daerah dari keadaan-keadaan darurat sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa tanggapan yang efektif terhadap kebutuhan kemanusiaan di awal krisis tergantung pada tingkat kesiapan dan perencanaan lembaga-lembaga di lapangan, serta kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang ada pada mereka. Berdasar dari hal diatas, maka menjadi penting untuk menyusun rencana kontinjensi di tingkat Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.

Perencanaan kontinjensi merupakan dokumen manajemen yang digunakan untuk memastikan adanya pengaturan yang memadai dalam mengantisipasi suatu keadaan krisis terjadi. Dan hal ini hanya dapat tercapai melalui serangkaian partisipasi dalam proses perencanaan kontinjensi itu sendiri, hingga melalui aksi tindak lanjut dan revisi rencana berikutnya.

Hal tersebut diatas merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, bahwa Tujuan Penanggulangan Bencana sebagai berikut :

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- d. Menghargai budaya lokal;
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan serta;
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Landasan Hukum tersebut di atas mendasari semua tindakan para pihak pemangku kepentingan/stekholder Penanggulangan Bencana terutama yang ada di Kabupaten Solok untuk berkewajiban menyusun suatu rencana penanggulangan bencana yang bisa dipakai dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan

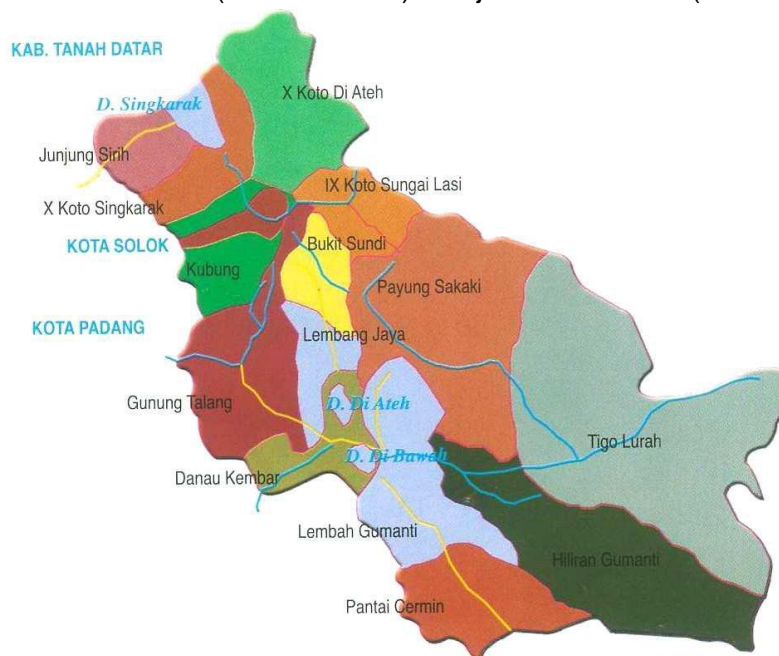
3. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SOLOK

Secara geografis letak Kabupaten Solok berada antara 00° 32' 14" dan 01° 46'45" Lintang Selatan dan 100° 25' 00" dan 101° 41' 41" Bujur Timur. Kabupaten Solok sangat strategis karena disamping dilewati jalur Jalan Lintas Sumatera, daerahnya juga berbatasan langsung dengan Kota Padang selaku ibukota Provinsi Sumatera Barat. Kondisi Hidrologis kabupaten Solok merupakan daerah subur dengan curah hujan sedang sampai tinggi pada sebagian besar wilayahnya. Batas administrasi Kabupaten Solok sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Tanah Datar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Sawah Lunto dan Kab. Sijunjung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Solok Selatan

a. ADMINISTRASI

Pemekaran wilayah Kabupaten Solok pada akhir tahun 2003 telah melahirkan satu kabupaten baru yaitu Kabupaten Solok Selatan. Dengan terjadinya pemekaran ini berarti luas wilayah Kabupaten Solok mengalami pengurangan secara signifikan dari semula 708.402 Ha (7 084.02 Km²) menjadi 373.800 Ha (3.738.00 Km²).



Secara administrasi Kabupaten Solok memiliki 14 Kecamatan. Kecamatan terluas adalah Tigo Lurah dan kecamatan dengan luas terkecil adalah Danau Kembar.

Tabel 1
Luas Kecamatan, Jumlah Nagari, dan Jorong di Kabupaten Solok

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah	
			Nagari	Jorong
1	Pantai Cermin	366.00	2	28
2	Lembah Gumanti	459.72	4	39
3	Hiliran Gumanti	263.28	3	20
4	Payung Sekaki	364.50	3	11
5	Tigo Lurah	602.50	5	20
6	Lembang Jaya	99.90	6	43
7	Danau Kembar	70.10	2	19
8	Gunung Talang	385.00	8	40
9	Bukit Sundi	109.00	5	20
10	IX Koto Sungai Lasi	171.00	9	28
11	Kubung	192.00	8	37
12	X Koto Diatas	257.00	9	52
13	X Koto Singkarak	295.50	8	46
14	Junjung Sirih	102.50	2	11
Jumlah		3.738.00	74	414

b. KONDISI FISIK WILAYAH

Secara umum daerah ini beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 12° C hingga 30° C . Ketinggian daerah berkisar antara 329 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut. Daerah dengan ketinggian antara 300 sampai 500 meter di atas permukaan laut meliputi sekitar 37 %, kawasan yang berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter meliputi 34 % dan kawasan yang berada pada ketinggian 1.000 sampai 1.700 meter meliputi sekitar 29 % dari luas keseluruhan kabupaten Solok. Elemen Topografi yang paling menonjol dari Kabupaten Solok adalah danau. Daerah ini mempunyai lima buah danau yaitu Danau Singkarak (1.129,29 Ha), Danau Diatas (17,19 Ha), Danau Dibawah (16,83 Ha), Danau Talang (1,9 Ha) dan Danau Tuo (1,5 Ha). Perbedaan cukup tajam antara satu kawasan dengan kawasan lainnya membuat kondisi sumber daya alam saling berbeda.

Berdasarkan peta topografi, wilayah Kabupaten Solok dapat dibagi atas 2 kelompok besar yaitu yang berada di utara gunung talang sebanyak 9 kecamatan dan selatan Gunung Talang, sebanyak 5 kecamatan. Karena posisi Ibukota Kabupaten yang berada di utara Gunung Talang, masyarakat yang berada di utara lebih mudah mendapatkan berbagai akses untuk kebutuhan mereka. Baik itu komoditi, informasi dan edukasi. Sementara itu tidak demikian halnya dengan 43% masyarakat Kabupaten Solok yang berada di bagian selatan Gunung Talang. Lima kecamatan yang ada di selatan, adalah, Danau Kembar, Tigo Lurah, Pantai Cermin, Lembah Gumanti dan Hiliran Gumanti.

c. KEPENDUDUKAN

Penduduk Kabupaten Solok pada Tahun 2012 berjumlah 355.077 jiwa. Komposisinya terdiri dari 174.695 jiwa penduduk laki-laki dan 180.382 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin 96.85. Angka ini berarti setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Solok terdapat 97 penduduk laki-laki atau dengan kata lain jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.

Bila diperhatikan kepadatan penduduk, terjadi peningkatan kepadatan dari 94.36 jiwa perkilometer persegi pada tahun 2011 menjadi 94.99 jiwa perkilometer persegi pada tahun 2012. Peningkatan kepadatan penduduk merupakan dampak langsung dari meningkatnya jumlah penduduk dibandingkan tahun sebelumnya.

Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umum ternyata penduduk berusia 10–14 tahun memiliki jumlah terbesar yaitu 10.53 persen dan diikuti oleh kelompok umur 5–9 tahun 10.12 persen, serta kelompok umur 0–4 tahun sebesar 10.30 persen. Sedangkan jumlah penduduk tersedikit ada pada kelompok umur 70–74 tahun hanya sebesar 1.58 persen. Komposisi kelompok umur lainnya relatif lebih kecil dan masing-masing tidak melebihi angka 10 persen.

Tabel 2
Jumlah Penduduk di Kabupaten Solok

No.	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki – Laki	Perempuan	
1	Pantai Cermin	9.945	10.385	20.330
2	Lembah Gumanti	28.085	28.036	56.121
3	Hiliran Gumanti	8.240	8.204	16.444
4	Payung Sekaki	4.055	4.050	8.105
5	Tigo Lurah	4.851	4.982	9.833
6	Lembang Jaya	12.947	13.236	26.183
7	Danau Kembar	9.578	9.682	19.260
8	Gunung Talang	23.901	24.450	48.351
9	Bukit Sundi	11.068	11.960	23.028
10	IX Koto Sungai Lasi	4.730	4.772	9.502
11	Kubung	28.250	29.084	57.334
12	X Koto Diatas	8.307	9.165	17.472
13	X Koto Singkarak	15.196	16.214	31.410
14	Jungjung Sirih	5.542	6.162	11.704
Jumlah		174.695	180.382	355.077

Sumber : Solok Dalam Angka, BPS, 2013

Sedangkan jumlah penduduk di 7 kecamatan yang berada di area terpapar pada daerah rawan bencana longsor, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Potensi Longsor

No.	Kecamatan	Nagari		Jenis Kelamin	
				Laki-laki	Perempuan
1	Kubung	1	Saok Laweh	2820	2913
2	IX KT. Sei. Lasi	2	Taruang – taruang	473	477
		3	Pianggu	473	477
		4	Indudur	473	477
		5	Supayang	405	405
3	Payung Sekaki	6	Sirukam	405	405
		7	Sungai Janiah	2390	2445
4	Gn. Talang	8	Air Batumbuak	2390	2445
		9	Batang Barus	2390	2445
5	X Kt. Diatas	10	Paninjauan	831	917
6	Lembah Gumanti	11	Air Dingin	2809	2804
7	Bukit Sundi	12	Bukit Tandang	1107	1196

Ket : Angka Perkiraan

Dalam penyusunan renkon, komposisi penduduk terpenting adalah dilihat dari kelompok rentan yaitu : wanita, anak-anak dan manula serta penduduk berkebutuhan khusus. Untuk komposisi penduduk rentan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Jumlah Penduduk Kelompok Usia Rentan Berdasarkan Jenis Kelamin di Daerah Potensi Longsor

No	Kecamatan	Desa	Penduduk laki laki			Penduduk perempuan		
			<4	5-14	>70	<4	5-14	>70
1	Kubung	1 Saok Laweh	290	585	45	300	601	46
2	IX KT. Sei. Lasi	2 Taruang – taruang	49	98	7	49	99	8
		3 Pianggu	49	98	7	49	99	8
		4 Indudur	49	98	7	49	99	8
3	Payung Sekaki	5 Supayang	48	84	6	48	84	6
		6 Sirukam	48	84	6	48	84	6
4	Gn. Talang	7 Sungai Janiah	246	494	38	252	505	39
		8 Air Batumbuak	246	494	38	252	505	39
		9 Batang Barus	246	494	38	252	505	39
5	X Kt. Diatas	10 Paninjauan	86	172	13	94	189	14
6	Lembah Gumanti	11 Air Dingin	289	580	44	288	579	44
7	Bukit Sundi	12 Bukit Tandang	114	229	17	123	247	19

Ket : Angka Perkiraan

Tabel 5
Jumlah Penduduk Penyandang Cacat

No.	Kecamatan	Jumlah Penyandang Cacat
1	Pantai Cermin	92
2	Lembah Gumanti	42
3	Hiliran Gumanti	34
4	Payung Sekaki	83
5	Tigo Lurah Bajanjang	68
6	Lembang Jaya	27
7	Danau Kembar	14
8	Gunung Talang	85
9	Bukit Sundi	154
10	Ix Koto Sungai Lasi	61
11	Kubung	53
12	X Koto Diatas	72
13	X Koto Singkarak	50
14	Junjung Sirih	11

Sumber : Solok Dalam Angka, BPS, 2013

Data jumlah penduduk, jenis kelamin, usia rentan dan jumlah penduduk berkebutuhan khusus diperlukan dalam penyusunan kontijensi bencana untuk mengukur tingkat kerentanan yang ada di Kabupaten Solok yang dimanfaatkan untuk menentukan resiko bencana di Kabupaten Solok.

Dari 355.077 jumlah penduduk Kabupaten Solok, 150.310 orang yang bekerja atau sebesar 42% dari jumlah penduduk. 6 sektor pekerjaan penduduk Kabupaten Solok adalah pertanian, industry, perdagangan / hotel / rumah makan, jasa, jasa pendidikan dan jasa kesehatan.

Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian yaitu sebanyak 97.424 penduduk bekerja dalam sektor ini atau sebesar 64% dari jumlah penduduk bekerja disusul oleh bidang perdagangan/hotel/rm sebesar 12%, jasa pendidikan sebesar 6,8%, industri 6,4%, jasa 5,95%, dan terendah adalah kesehatan yaitu sebesar 4,85%.

Tabel 6
Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Pekerjaan di Kabupaten Solok**

No	Kecamatan	Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja	Penduduk 15 tahun Ke Atas Menurut Bidang Pekerjaan						Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Usaha	
		Jumlah	Pertanian	Industri	Perdagangan /Hotel/RM	Jasa saja	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan	Berusaha	Buruh
1	Pantai Cermin	10,166	7,052	703	1,049	381	547	40	4,844	5,322
2	Lembah Gumanti	18,924	20,272	648	1,255	888	910	91	11,278	11,282
3	Hiliran Gumanti	7,397	5,689	395	482	213	211	31	3,626	2,187
4	Payung Sekaki	3,994	2,544	519	405	126	224	23	1,929	2,065
5	Tigo Lurah	5,292	4,611	208	178	74	80	6	2,689	2,603
6	Lembang Jaya	11,811	8,854	346	1,218	654	320	42	5,931	5,880
7	Danau Kembar	9,913	8,030	94	824	383	355	25	5,101	4,821
8	Gunung Talang	19,842	7,412	1,426	3,317	1,717	1,600	158	6,900	10,188
9	Bukit Sundi	10,835	6,745	644	537	558	617	115	4,339	6,496
10	IX Koto Sungai Lasi	5,246	3,478	365	543	341	293	22	2,601	2,645
11	Kubung	22,750	8,686	2,202	4,302	1,962	3,369	373	9,085	13,735
12	X Koto Diatas	8,508	5,518	501	995	482	437	50	2,353	4,490
13	X Koto Singkarak	11,292	6,210	1,312	2,275	807	1,071	127	5,987	6,700
14	Junjung Sirih	4,340	2,323	378	766	370	243	25	2,563	1,777
Jumlah		150,310	97,424	9,741	18,146	8,956	10,277	1,128	69,226	80,191

Sumber : DIBI, BNPB, 2014

4. PENGERTIAN-PENGERTIAN

- a. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- b. **Bencana Alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- c. **Bencana Nonalam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- d. **Bencana Sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- e. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- f. **Kegiatan Pencegahan Bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- g. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- h. **Kontinjensi** adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
- i. **Rencana Kontinjensi.** Suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
- j. **Peringatan Dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- k. **Mitigasi** adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- l. **Tanggap Darurat Bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

- m. **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- n. **Rekonstruksi** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
- o. **Ancaman Bencana** adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
- p. **Rawan Bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
- q. **Pemulihan** adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
- r. **Pencegahan Bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- s. **Risiko Bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- t. **Bantuan Darurat Bencana** adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
- u. **Status Keadaan Darurat Bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
- v. **Pengungsi** adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
- w. **Setiap Orang** adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- x. **Korban Bencana** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
- y. **Pemerintah Pusat**, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- z. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur, Bupati / Walikota, atau Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- aa. **Lembaga Usaha** adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- bb. **Lembaga Internasional** adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

5. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana kontijensi ini disusun sebagai landasan operasional, strategi dan pedoman dalam penanganan bencana pada saat tanggap darurat, yang melibatkan para pemangku kepentingan, sehingga pelaksanaannya Rencana Operasional pada saat tanggap darurat menjadi lebih jelas, terkoordinasi dan terpadu. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kontijensi ini adalah :

- a. Sebagai pedoman atau dijadikan dasar sebagai Rencana Operasional tanggap darurat pada waktu terjadinya longsor dan umumnya dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
- b. Tersediannya data kebutuhan penanganan bencana, ketersediaan sumberdaya dan kesenjangan sumberdaya
- c. Memastikan mekanisme koordinasi semua stakeholder dalam penanganan bencana
- d. sebagai Upaya menggalang komitmen para pihak pada kondisi darurat

6. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI

Kegiatan penyusunan rencana Kontinjensi ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim Kerja Rencana Kontinjensi yang bertugas menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana Kontinjensi;
- b. Orientasi dalam rangka penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana longsor tentang pentingnya rencana Kontinjensi;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data serta updating;
- d. Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif;
- e. Verifikasi data;

- f. Analisa data sumberdaya dengan menyusun proyeksi kebutuhan dibanding dengan sumber daya yang tersedia;
- g. Penyusunan rancangan awal rencana Kontinjensi;
- h. Penyusunan naskah akademis, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontinjensi yang disepakati;
- i. Konsultasi publik tentang hasil rumusan rencana Kontinjensi;
- j. Penyebaran / disemenasi dokumen rencana Kontinjensi kepada semua pelaku penanggulangan bencana;
- k. Penandatanganan Komitmen dalam menjalankan dan mengaktifkan rencana Kontinjensi.

7. PERENCANAAN PROGRAM

Perencanaan kontijensi ini dibuat secara bersama-sama oleh semua pihak dan multi sektor yang terlibat serta berperan dalam penanganan bencana dalam satu Workshop, termasuk diantaranya dari pihak pemerintah, organisasi non pemerintah, dan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip penyusunan perencanaan kontijensi yang disusun sebagai berikut :

- a. Proses penyusunan dilakukan secara partisipatif;
- b. Skenario dan tujuan secara kesepakatan bersama;
- c. Dilakukan secara terbuka;
- d. Pendelegasian peran dan tugas setiap pelaku secara bertanggung jawab;
- e. Dibuat untuk membuat respon yang dapat diaplikasikan dalam menghadapi keadaan darurat.

Adapun proses penyusunan rencana kontijensi tersebut sebagaimana terlihat pada silabus berikut :



a. PENENTUAN KEJADIAN

Pada tahapan ini dilakukan penentuan risiko bencana dan wilayah kemungkinan terjadi bencana dengan dasar data sejarah terjadinya longsor dan peta Kawasan Rawan, sehingga semua pihak dapat memahami sejauh mana dampak yang bisa ditimbulkan bila terjadi bencana. Dalam hal ini semua pihak terkait dapat memahami tanda-tanda batas indikasi dan faktor pemicu terjadinya suatu bencana, dan mengidentifikasi tindakan untuk penanganannya.

b. PENGEMBANGAN SKENARIO

Pada tahapan pengembangan skenario, dibuat suatu peta risiko longsor berdasarkan pada kawasan longsor yang sebelumnya telah diidentifikasi akan ancaman yang mungkin terjadi. Pengembangan skenario dimulai dari dampak terparah yang diakibatkan oleh suatu bencana. Pengembangan skenario ini dibuat secara bersama antara stake holder dan lembaga swasta dalam suatu Workshop dan dikomunikasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Ini menjadi dasar dalam perencanaan tindakan sebagai respon tanggap darurat untuk Kabupaten Solok.

c. PENENTUAN TINDAKAN

Setelah pengembangan skenario, kemudian ditentukan tindakan (peran) yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang ditentukan untuk menghadapi keadaan darurat. Penentuan ini dilakukan dengan cara diskusi, workshop, kunjungan lapangan, dan finalisasi perencanaan yang mengacu pada rencana tanggap darurat dan penentuan sumber daya untuk dimobilisasi.

d. PERENCANAAN DAN INVENTARISASI UNTUK MEKANISME RESPON

Pada tahap ini dilakukan pengkajian terhadap kerentanan dan kapasitas Kabupaten Solok apabila terjadi suatu bencana baik secara sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur, social dan ekonomi. Serta melakukan pendataan kebutuhan yang dibutuhkan pada saat menghadapi keadaan darurat. Kesemua ini dilakukan untuk mendapatkan penentuan Mekanisme Respon. Pada tahapan mekanisme respon ditentukan sistem dan kegiatan menghadapi keadaan darurat yang dilakukan secara terkoordinir dalam suatu Prosedur Tetap (Protap) menghadapi keadaan darurat dan disusun dalam suatu Rencana Kontijensi Kabupaten Solok.

8. AKTIVASI RENCANA KONTIJENSI

Rencana Kontijensi diaktivasi setelah ada penetapan status darurat bencana longsor oleh Bupati Solok dan telah ditetapkan serta diaktifasinya organisasi komando Tanggap Darurat Bencana oleh Kepala BPBD Kabupaten Solok melalui rapat penyusunan rencana operasi yang dipimpin oleh komando Tanggap Darurat Bencana.

Data-data rencana pada dokumen kontijensi disepakati untuk dimutakhirkan setiap 2 (dua) tahun dan dokumen rencana kontijensi secara keseluruhan berlaku selama 5 (lima) tahun jika selama waktu yang ditentukan tidak terjadi bencana longsor, maka dilakukan kaji ulang terhadap rencana kontijensi.

9. POTENSI KEJADIAN BENCANA

Kabupaten Solok merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki karakteristik bencana yang cukup tinggi dan kompleks, dalam arti bencana yang ada di Kabupaten Solok ini adalah gempa bumi, tanah longsor, banjir, letusan Gunung Api Talang, angin puting beliung, kebakaran, hal ini semakin menjadikan rencana kontijensi menjadi kompleks, selain itu ancaman bencana ini dapat ancaman tunggal tetapi juga dapat menjadi kombinasi dari ancaman-ancaman yang ada. Dengan demikian ancaman bencana yang terjadi di Kabupaten Solok membutuhkan penanganan bersama dalam arti penanganan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat dan dunia swasta. Untuk melihat potensi kejadian sejarah perlu dikaji kejadian longsor berdasarkan profil kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana deputy bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan tahun 2013 :

-
- a. Pada jum'at pagi tanggal 15 Desember 2006 terjadi bencana tanah longsor di Sarasah Jorong Koto Baru Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti, ini terjadi karena tanah terpenuhi oleh air yang turun selama 2 hari masa tanah bergerak menuruni lereng dengan volume yang semakin banyak hingga menimpa sekitar 10 unit rumah dan 1 unit mesjid. Korban akibat tanah longsor ini adalah 18 orang meninggal, 11 orang luka-luka, 60 kepala keluarga diungsikan sekitar 15 hektar sawah rusak dan gagal panen.
 - b. Pada tanggal 24 Maret 2010 di Jorong Bungo Tanjung Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung, terjadi bencana tanah longsor yang mengakibatkan 5 rumah tertimpa material longsor dan 3 orang meninggal dunia dan 8 orang luka berat

BAB II

PENILAIAN BAHAYA DAN PENENTUAN KEJADIAN

1. PENILAIAN BAHAYA

Penilaian bahaya Kabupaten Solok didasari oleh dua penilaian ancaman yaitu dengan menilai probability yaitu kemungkinan terjadinya bencana dan dampak kerugian atau kerusakan ditimbulkan dengan asumsi skoring sebagai berikut :

- a. Skala probabilitas
 - 1) Angka 5 pasti (hampir dipasti 80%-99%)
 - 2) Angka 4 kemungkinan besar (60%-80% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 10 tahun mendatang)
 - 3) Angka 3 kemungkinan terjadi (40%-60% terjadi tahun depan atau sekali dalam 100 tahun)
 - 4) Angka 2 kemungkinan kecil (20%-40% terjadi tahun depan atau sekali lebih dari 100 tahun)
 - 5) Angka 1 kemungkinan sangat kecil (hingga 20 %)
- b. Dampak kejadian yang menimbulkan :
 - 1) Angka 5 sangat parah (80%-99%) Wilayah hancur dan lumpuh total
 - 2) Angka 4 parah (60%-80%) wilayah hancur
 - 3) Angka 3 sedang (40%-60%) wilayah rusak
 - 4) Angka 2 ringan (20%-40%) wilayah rusak
 - 5) Angka 1 sangat ringan (kurang dari 20 %, wilayah rusak

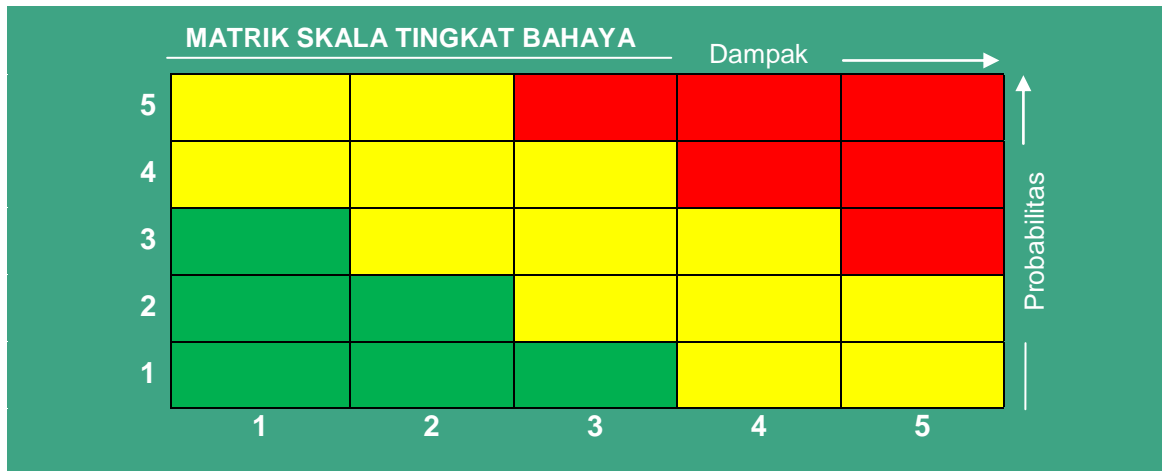
Dari instrumen diatas,dapat dihitung probability dan dampak dengan mengasumsikan bencana yang terjadi di Kabupaten Solok dengan matrik sebagai berikut :

TABEL 7
Penilaian Bahaya

No	Jenis Ancaman/ Bahaya	Probability	Dampak
1	Letusan Gunung Api	5	3
2	Banjir	5	3
3	Longsor	4	3
4	Gempa Bumi	4	2
5	Kekeringan	4	1
6	Kebakaran lahan	2	1

dari tabel diatas, dapat kita hitung tingkat bahaya dengan menggunakan matrik dibawah ini

Tabel. 8
Matrik Skala Tingkat Bahaya



Dari matrik diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Solok bencana yang mempunyai probability dan dampak resiko tinggi adalah gunung api, gempa, banjir dan longsor dengan hasil perhitungan aman matrik kolom bencana

2. PENENTUAN KEJADIAN

Propinsi Sumatera Barat terutama Kabupaten Solok memiliki resiko bencana longsor tertinggi kedua di Indonesia setelah Propinsi Jawa Barat hal tersebut dapat dianalisa dengan tingginya intensitas curah hujan serta kemiringan yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 9
Kemiringan Kabupaten Solok

No	Klasifikasi	Luas (%)	Luas Ha	Presentase luas (%)
1	Datar, agak landai	0-8	53.325	7,96
2	Landai	8-15	24.606	3,67
3	Agak curah	15-25	89.984	13,42
4	Curah	25-40	81.980	12,23
5	Sangat curah	> 40	420.400	62,72

Rencana Kontijensi yang disusun yaitu rencana Kontijensi untuk menghadapi bencana longsor sebagai prioritas dalam penanggulangan bencana

BAB III PENGEMBANGAN SKENARIO

Kabupaten Solok yang topografinya lebih banyak berbukit dan bergunung tergolong rawan longsor terutama pada saat musim penghujan, hal ini dimungkinkan karena kondisi tanah di daerah – daerah Kabupaten Solok memiliki tingkat kelabilan yang tinggi, untuk itu wilayah dibagian yang topografinya berbukit dan bergunung perlu lebih waspada di Daerah yang memiliki kemiringan tinggi, beberapa Kecamatan yang harus waspada bahaya longsor antaran lain.

Tabel 10
Daerah yang beresiko terjadi bencana longsor

No.	Kecamatan	Jml Nagari	Jml Jiwa	Jiwa Terancam
1.	Kubung	1	5733	573
2.	IX. Koto Sei. Lasi	3	2851	285
3.	Payung Sekaki	1	1621	162
4.	Bukit Sundi	1	2300	230
5.	Gunung Talang	2	9670	967
6.	X Koto Diatas	1	1742	174
7.	Lembah Gumanti	1	5612	561
	Jumlah	12	29529	2952

Ket : Angka Perkiraan

Dampak longsor dipicu oleh intensitas curah hujan yang tinggi pada wilayah Kabupaten Solok. Aspek-aspek yang diperkirakan akan terkena dampak meliputi :

1. PENDUDUK

Dari data Statistik Kabupaten Solok, penduduk yang terancam bencana Longsor meliputi wilayah 7 Kecamatan yang terdiri dari 12 Nagari dengan jumlah penduduk 2.952 jiwa. dengan skenario kejadian yang telah disepakati, yaitu longsor diperkirakan terjadi secara bersamaan di 3 Kecamatan (Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung, Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas , dan Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti), maka penduduk yang terancam jiwa dan hartanya sebanyak 1.419 jiwa. berdasarkan hal tersebut maka skenario jumlah penduduk yang akan terkena dampak langsung dari kejadian longsor dapat dihitung pada tabel berikut.

Tabel 11
Dampak longsor terhadap penduduk

No	Kecamatan	Jlh Jiwa	Jlh Jiwa terancam	Dampak							
				Meninggal / Hilang		Luka – luka		Mengungsi		Pindah / Selamat	
				%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa
1	Kubung	5733	573	0.5	3	10	57	49.5	284	40	229
2	IX Koto Sei Lasi	2851	285	0.5	3	10	28	49.5	140	40	114
3	X Koto Diatas	1742	174	0.5	1	10	17	49.5	86	40	70
4	Gunung Talang	9670	967	0.5	5	10	97	49.5	479	40	386
5	Payung Sekaki	1621	162	0.5	1	10	16	49.5	80	40	65
6	Lembah Gumanti	5612	561	0.5	3	10	56	49.5	278	40	224
7	Bukit Sundi	2300	230	0.5	1	10	23	49.5	114	40	92
Jumlah		29529	2952		17		294		1461		1180

Ket : Angka Perkiraan

Walaupun dalam skenario yang disepakati dalam perencanaan kontijensi ini terjadinya longsor pada 3 Kecamatan secara bersamaan namun telah dibuat perkiraan dampak terhadap penduduk untuk 7 Kecamatan terancam longsor. Hal ini bertujuan agar data perkiraan ini bisa jadi ancaman pada saat penyusunan secara operasi sekiranya longsor terjadi pada daerah lainnya.

2. FASILITAS KRITIS

Longsor diperkirakan juga akan mengancam sebagian prasarana serta aset yang berada di daerah rawan longsor. Berdasarkan inventarisasi fasilitas kritis yang diperkirakan terkena dampak bencana longsor diantaranya adalah jalan, jembatan, jaringan PLN, jaringan PDAM dan sarana pelayanan kesehatan.

Fasilitas kritis yang dimaksud disini adalah seluruh asset yang terkait fungsinya sebagai aspek pendukung kebutuhan dasar pasca bencana sehingga harus menjadi skala prioritas.

a. Jalan

Tabel 12
Jalan yang tidak berfungsi

No	Kecamatan	Terancam	Rusak					
			Berat		Sedang		Ringan	
			%	M	%	M	%	M
1	Kubung	8850	10	885	15	1327	75	6638
2	IX Koto Sei Lasi	12930	10	1293	15	1940	75	9697
3	X Koto Diatas	13950	10	1395	15	2092	75	10463
4	Gunung Talang	35318	10	3532	15	5298	75	26488
5	Payung Sekaki	1256	10	126	15	188	75	942
6	Lembah Gumanti	7570	10	757	15	1136	75	5677
7	Bukit Sundi	4595	10	460	15	689	75	3446
JUMLAH		75619		7520		11343		56714

b. Jembatan

Tabel 13
Jembatan yang tidak berfungsi

No	Kecamatan	Terancam	Rusak					
			Berat		Sedang		Ringan	
			%	M	%	M	%	M
1	Kubung	25	10	2.5	15	3.75	75	18.75
2	IX Koto Sei Lasi	63	10	6.3	15	9.45	75	47.25
3	X Koto Diatas	22	10	2.2	15	3.3	75	16.5
4	Gunung Talang	54	10	5.4	15	8.1	75	40.5
5	Payung Sekaki	16	10	1.6	15	2.4	75	12
6	Lembah Gumanti	11	10	1.1	15	1.65	75	8.25
7	Bukit Sundi	19	10	1.9	15	2.85	75	14.25
JUMLAH		210		21		31,5		157,5

c. Jaringan PLN

Tabel 14
Pelanggan PLN yang tidak berfungsi

No	Kecamatan	Terancam	Rusak					
			Berat		Sedang		Ringan	
			%	M	%	M	%	M
1	Kubung	887	10	89	15	133	75	665
2	IX Koto Sei Lasi	904	10	90	15	136	75	678
3	X Koto Diatas	326	10	34	15	49	75	245
4	Gunung Talang	1858	10	186	15	279	75	1394
5	Payung Sekaki	495	10	50	15	74	75	371
6	Lembah Gumanti	619	10	62	15	93	75	464
7	Bukit Sundi	372	10	37	15	56	75	279
JUMLAH		5461		548		820		4096

d. Jaringan PDAM

Tabel 15
Jaringan PDAM yang tidak berfungsi

No	Kecamatan	Terancam	Rusak					
			Berat		Sedang		Ringan	
			%	M	%	M	%	M
1	Kubung	-	-	-	-	-	-	-
2	IX Koto Sei Lasi	-	-	-	-	-	-	-
3	X Koto Diatas	-	-	-	-	-	-	-
4	Gunung Talang	-	-	-	-	-	-	-
5	Payung Sekaki	81	10	8	15	12	75	61
6	Lembah Gumanti	-	-	-	-	-	-	-
7	Bukit Sundi	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		81		8		12		61

e. Sarana Pelayanan Kesehatan

Tabel 16
Sarana Pelayanan Kesehatan yang tidak berfungsi

No	Kecamatan	Terancam	Rusak					
			Berat		Sedang		Ringan	
			%	M	%	M	%	M
1	Kubung	1	-	-	-	-	100	1
2	IX Koto Sei Lasi	3	-	-	-	-	100	3
3	X Koto Diatas	2	-	-	-	-	100	2
4	Gunung Talang	6	-	-	-	-	100	6
5	Payung Sekaki	2	-	-	-	-	100	2
6	Lembah Gumanti	1	-	-	-	-	100	1
7	Bukit Sundi	1	-	-	-	-	100	1
JUMLAH		16						16

3. FASILITAS UMUM

Selain fasilitas kritis, longsor juga di perkirakan akan merusak fasilitas umum baik secara fisik maupun fungsi yang dimiliki fasilitas umum adalah seluruh fasilitas atau aset yang perlu dipulihkan fungsinya secara masih bisa menunggu setelah skala prioritas setelah pemulihan fungsi lintas teratasi. Beberapa fasilitas umum yang akan menjalani kerusakan tersebut adalah fasilitas tradisional, sekolah dan rumah ibadah.

a. Pasar Tradisional

Tabel 17
Pasar tradisional yang tidak berfungsi

No	Kecamatan	Terancam	Rusak					
			Berat		Sedang		Ringan	
			%	Unit	%	Unit	%	Unit
1	Kubung	-	-	-	-	-	-	-
2	IX Koto Sei Lasi	1	-	-	-	-	100	1
3	X Koto Diatas	1	-	-	-	-	100	1
4	Gunung Talang	-	-	-	-	-	-	-
5	Payung Sekaki	1	-	-	-	-	100	1
6	Lembah Gumanti	-	-	-	-	-	-	-
7	Bukit Sundi	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		3	-	-	-	-	-	3

b. Sekolah

Tabel 18
Sekolah yang tidak berfungsi

No	Kecamatan	Terancam	Rusak					
			Berat		Sedang		Ringan	
			%	Unit	%	Unit	%	Unit
1	Kubung	5	-	-	-	-	100	5
2	IX Koto Sei Lasi	12	-	-	25	3	75	9
3	X Koto Diatas	6	-	-	50	3	50	3
4	Gunung Talang	15	-	-	40	6	60	9
5	Payung Sekaki	5	-	-	40	2	60	3
6	Lembah Gumanti	5	-	-	40	2	60	3
7	Bukit Sundi	6	-	-	50	3	50	3
JUMLAH		54	-	-	-	19		35

c. Rumah Ibadah

Tabel 19
Rumah ibadah yang tidak berfungsi

No	Kecamatan	Terancam	Rusak					
			Berat		Sedang		Ringan	
			%	Unit	%	Unit	%	Unit
1	Kubung	10	10	1	20	2	70	7
2	IX Koto Sei Lasi	24	20	5	25	6	55	13
3	X Koto Diatas	10	10	1	20	2	70	7
4	Gunung Talang	24	20	5	20	5	60	14
5	Payung Sekaki	12	25	3	20	2	55	7
6	Lembah Gumanti	10	10	1	20	2	70	7
7	Bukit Sundi	10	10	1	20	2	70	7
JUMLAH		100		17		21		62

d. Pemerintahan

Tabel 20
Gedung pemerintahan yang tidak berfungsi

No	Kecamatan	Terancam	Rusak					
			Berat		Sedang		Ringan	
			%	Unit	%	Unit	%	Unit
1	Kubung	2	-	-	-	-	100	2
2	IX Koto Sei Lasi	6	-	-	-	-	100	6
3	X Koto Diatas	2	-	-	-	-	100	2
4	Gunung Talang	6	-	-	-	-	100	6
5	Payung Sekaki	4	-	-	-	-	100	4
6	Lembah Gumanti	2	-	-	-	-	100	2
7	Bukit Sundi	2	-	-	-	-	100	2
JUMLAH		24	-	-	-	-		24

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam upaya penanganan darurat bencana, seluruh aspek terkena dampak perlu dipulihkan fungsinya dengan sistim, sehingga kepulihan fungsi tersebut menjadi parameter untuk pengakhiran status darurat bencana longsor (lampiran 1). berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu disusun kebijakan dan strategi untuk mendorong lahirnya kegiatan-kegiatan yang mempercepat proses pemulihan darurat bencana (early recovery)

Adapun beberapa kebijakan penting yang harus diambil serta strategi yang dapat dilakukan dalam penanganan darurat bencana yaitu :

1. Memobilisasi dan menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki daerah untuk penanganan darurat bencana :
 - a. Setiap sektor melaksanakan fungsi koordinasi
 - b. Mengoptimalkan fungsi posko utama dan posko lapangan sebagai lalu lintas pemberian bantuan untuk menghindari duplikasi atau keterabaian
 - c. Mengoptimalkan seluruh instansi / lembaga / masyarakat yang terkait penanggulangan bencana untuk mengerakkan semua sumber daya baik personil maupun sarana dan prasarana yang sudah disiapkan sebelumnya untuk di pergunakan.
2. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar korban dan perlindungan terhadap kelompok rentan :
 - a. Mengaktifkan Tim Fire and Rescue ke lokasi bencana secara cepat dan akurat, dengan memprioritaskan lansia, anak anak, pasien rumah sakit, penyandang cacat dan ibu hamil dan melaporkan kepada pihak terkait.
 - b. Mendirikan tenda pengungsi, dapur umum, mck, bak penampungan air bersih dan menyediakan penerangan (generator)
 - c. Mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan yang diperlukan untuk penanggulangan dukungan bantuan dari luar.
 - d. Mempersiapkan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh lokasi bencana.
3. Mengoptimalkan manajemen penanganan darurat bencana :
 - a. Merealisasikan prosedur tetap bencana longsor
 - b. Merealisasikan rencana kontijensi menjadi rencana operasi
 - c. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian serta analisis dan evakuasi terhadap kegiatan penanganan darurat.
 - d. Keluar masuk informasi (data harus melalui satu pintu dari posko utama dan memanfaatkan informasi dan komunikasi baik lokal, nasional maupun internasional)

BAB V

PERENCANAAN KLAS TER

Perencanaa klaster ini diuraikan pembagian klaster yang berpedoman kepada panduan perencanaan kontijensi menghadapi bencana, jumlah penduduk, luas cakupan wilayah dan aspek-aspek yang akan terkena dampak serta unsur-unsur yang akan terkena dampak terancam bencana longsor

Pada masing-masing klaster akan diuraikan tentang sasaran oleh kegiatan yang dilakukan di SKPD / Instansi terkait penanggulangan bencana sesuai dengan situasi yang di hadapi oleh masing masing klaster, dampak bencana yang akan timbul, asumsi waktu untuk kegiatan klaster pada saat tanggap darurat adalah selama 30 hari (1 bulan)

Rincian klaster beserta sasaran dan kegiatannya masing-masing yang terdapat dalam rencana kontijensi menghadapi bencana longsor Kabupaten Solok

1. KLAS TER MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN

Koordinator : BPBD Kab. Solok

a. Situasi

Terjadinya bencana longsor yang dipicu oleh cuaca ekstrim dengan curah hujan yang lebat, mengakibatkan terjadinya bencana longsor secara bersamaan di 3 Kecamatan (Kubung, X Koto Diatas dan Lembah Gumanti.

Dampak dari bencana longsor mengakibatkan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tidak berfungsi saat terjadi bencana, semua bangunan dan sarana prasarana rusak berat, alat dan jaringan komunikasi tidak berfungsi (terputus). Maka Kepala Daerah akan menetapkan status darurat bencana. Dalam menghadapi situasi penanganan darurat bencana, diperlukan kesatuan tindak. Untuk itu, Komandan Tanggap Darurat dibantu oleh Koordinator Klaster terutama Klaster Manajemen dan Pengendalian melakukan evaluasi terhadap rencana evakuasi yang telah dibuat dan memastikan setiap klaster bekerja sesuai dengan bidang tugasnya dan mengacu pada sasaran yang akan dicapai.

Untuk kelancaran mekanisme penanggulangan bencana maka diadakan pengkoordinasian, pengaturan dan pengendalian semua kegiatan penanggulangan Bencana Tanah Longsor. BPBD sebagai *Leading Sektor* Penanggulangan Bencana di Kabupaten Solok akan melakukan fungsi koordinasi kepada seluruh institusi terkait penanggulangan bencana di Kabupaten.

b. Sasaran

- 1) Tergerakkannya sumberdaya yang ada untuk melakukan tanggap darurat
- 2) Terkendalikannya penanganan bencana secara baik
- 3) Terkoordinirnya segala bentuk bantuan bencana.
- 4) Terinventarisirnya kerugian dan korban yang ditimbulkan.
- 5) Terkendalnya pengamanan lingkungan di kawasan bencana dan di lokasi pengungsian dengan baik.

c. Kegiatan

Pada kluster manajemen dan pengendalian, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

Tabel. 21
Kegiatan Kluster Manajemen dan Pengendalian

NO	KEGIATAN	PELAKU / INSTITUSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
1	Kajian cepat	BPBD,TNI, Polri, Bapeda, Disdikpora, Telkom, Disosnakertrans, Dinas PU, Satpol PP, DKP, Kesbangpol, Dinkes, Pramuka, PMI, LSM, Dishubkominfo, PDAM, PLN, Dishutbun, Tagana, ORARI, RAPI, Perguruan tinggi, BPS	BPBD	1X6 Jam setelah kejadian bencana
2	Pendirian posko Taktis	BPBD	BPBD	1X12 Jam setelah kejadian bencana
3	Pendirian posko lapangan	BPBD,TNI, Dinkes, Dinas PU, Polri, Disosnakertrans, Satpol PP, Tagana, Pramuka, PMI, LSM, Komunitas masyarakat	TNI	1X12 Jam setelah status darurat bencana dikeluarkan
4	Pendirian pusat data	BPBD,TNI, Polri, Bapeda, Dishubkominfo,BPS, Disdukcapil, PMI, Dinkes, Dinsosnakertrans	BPBD	1X12 Jam setelah status darurat bencana dikeluarkan
5	Pendirian sistim informasi dan komunikasi	BPBD, TNI, Dishubkominfo, Bapeda, Polri, ORARI, RAPI, Humas, PMI	Humas	1X12 Jam setelah status darurat bencana dikeluarkan
6	Pembukaan jalur bantuan dari luar daerah	BPBD, TNI, Polri, Dinas PU, Dishubkominfo, PMI, Satpol PP, Komunitas masyarakat, perantau, LSM	BPBD	1 hari setelah status darurat di tetapkan

d. Proyeksi Kebutuhan

Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh klaster manajemen dan pengendalian, maka personil dan peralatan yang dibutuhkan, maka di proyeksikan jumlah biaya untuk klaster ini sebesar Rp. 1.358.850.000 (Satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam menjalankan operasi daruratnya, seperti terlihat pada tabel :

Tabel 22
Kebutuhan Personil dan Peralatan Kluster Manajemen dan Pengendalian

No	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Satuan	Harga satuan	Jumlah (Rp)
1	Faximile	1	1	-	Bh	1.500.000	-
2	Telepon / HP	12	12	-	Bh	1.500.000	-
3	Internet	1	-	1	Bh	15.000.000	15.000.000
4	Radio HF Komplit / 2 Mtr	3	3	-	Bh	14.000.000	-
5	Radio VHF Komplit / Allband	1	1	-	Bh	4.000.000	-
6	Telepon Satelite	2	-	2	Bh	2.000.000	4.000.000
7	Repeater	1	1	-	Set	45.000.000	-
8	Soundsistim / Toa	2	-	2	Bh	500.000	1.000.000
9	Infokus	1	2	-	Bh	10.000.000	-
10	Televisi	1	-	1	Bh	2.500.000	2.500.000
11	HT	6	18	-	Bh	1.500.000	-
12	Laptop	3	3	-	Bh	10.000.000	-
13	Handicam	3	1	2	Bh	7.500.000	15.000.000
14	Kamera Digital	3	2	1	Bh	2.000.000	2.000.000
15	Genset	10	3	7	Bh	12.500.000	87.500.000
16	Senter	20	-	20	Bh	80.000	1.600.000
17	White Board / Papan Data	5	-	5	Bh	50.000	250.000
18	Tenda Peleton	2	1	1	Bh	20.000.000	20.000.000
19	Tenda Regu	12	4	8	Bh	10.000.000	80.000.000
20	Tenda Keluarga	100	-	100	Bh	8.000.000	800.000.000
21	Kendaraan Roda 4 WD	5	3	2	Bh	350.000.000	700.000.000
22	Kendaraan Roda 2	10	5	5	Bh	25.000.000	125.000.000
23	ATK Posko	120	-	120	Bh	75.000	9.000.000
24	Fotocopy	120	-	120	Bh	50.000	6.000.000
25	Peralatan Penerangan	40	-	40	Bh	75.000	3.000.000
26	Konsumsi Posko	9000	-	9000	Bks	10.000	90.000.000
27	BBM Posko	12000	-	12000	Ltr	4.500	54.000.000
28	Uang Harian / Intensif	3000	-	3000	Hr	50.000	150.000.000
29	Penyiapan Tenda Pengenal	250	-	250	Bh	5.000	1.250.000
Jumlah							1.358.850.000

2. KLASTER KESEHATAN

a. Situasi

Apabila terjadi bencana longsor secara bersamaan di 3 Kecamatan di Kab. Solok yang di picu oleh curah hujan yang tinggi dan bencana lainnya, maka korban akan banyak berjatuhan tertimpa reruntuhan pohon yang tumbang dan tertimbun longsor, diperkirakan 29 orang yang terdiri dari : meninggal 18 orang dan luka – luka 11 orang akan tiba di pengungsian dalam keadaan butuh pertolongan baik luka berat maupun luka ringan. Sebagian diantaranya juga butuh trauma relief. Tim kesehatan yang bergabung dalam klaster kesehatan segera bergerak cepat untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa lebih banyak dan memberikan pertolongan kepada korban luka ringan dan korban lainnya di daerah pengungsian. Selain itu perlu dilakukan antisipasi untuk penyakit menular seperti penyakit kulit, flu, dan lain lain. Korban-korban luka berat perlu segera di evakuasi ke rumah sakit yang masih berfungsi atau rumah sakit darurat.

b. Sasaran

- 1) Adanya posko kesehatan
- 2) Terlaksananya pelayanan kesehatan yang optimal dan merata bagi korban
- 3) Tersedianya SDM kesehatan yang profesional
- 4) Tersedianya obat-obatan dan peralatan kesehatan yang di butuhkan
- 5) Berfungsinya seluruh sarana dan prasarana kesehatan yang ada (termasuk rumah sakit dan puskesmas), rumah sakit darurat serta rumah sakit lapangan.
- 6) Terhindarnya pengungsi dan petugas dari ancaman penyakit akibat dampak bencana yang terjadi serta terpeliharanya kesehatan lingkungan serta sanitasi
- 7) Antisipasi gangguan kesehatan jiwa/mental/psikologis masyarakat
- 8) Adanya laporan mengenai perkembangan situasi dan kondisi kesehatan kepada dinas instansi terkait sesuai dengan format yang ada
- 9) Adanya penanganan bagi pengungsi yang trauma
- 10) Teridentifikasinya jenazah yang ditemukan

c. Kegiatan

Kegiatan kluster kesehatan menjadi bagian penting dan proses penanganan darurat bencana terutama untuk memberikan pertolongan bagi korban yang selamat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

Tabel. 23
Kegiatan Kluster Kesehatan

NO	KEGIATAN	PELAKU / INSTITUSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
1	Kajian Cepat	BPBD, TNI, Polri, Disdikpora, Disosnakertrans, Diskes, Tagana, Pramuka, RSUD, PMI, LSM, Perguruan Tinggi	PMI	1 x 6 Jam setelah kejadian bencana
2	Pendirian Posko Kesehatan	BPBD, Diskes, PMI, TNI, Polri, LSM	Diskes	1 x 24 Jam setelah status darurat bencana dikeluarkan
3	Pendirian Rumah Sakit Lapangan	BPBD, Diskes, PMI, TNI, Polri, RSUD	Diskes	1 x 24 Jam setelah status darurat bencana dikeluarkan
4	Mobilisasi Tim Medis	TNI, Polri, Diskes, PMI, RSUD, LSM	Diskes	1 x 24 Jam setelah kejadian bencana
5	Penyediaan Obat-obatan	TNI, Polri, Diskes, PMI, RSUD, LSM	Diskes	1 x 24 Jam setelah kejadian bencana
6	Penyembuhan Trauma	BKBPP, PMI, Diskes, LSM, Komonitas Masyarakat, Disosnakertrans, Kamenag, MUI, Disdikpora, Perguruan Tinggi, Pramuka	Disosnakertrans	Setelah kejadian bencana (siaga tanggap darurat dicabut)

d. Proyeksi Kebutuhan

Berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kluster kesehatan, jumlah personil dan peralatan yang di butuhkan, maka di proyeksikan jumlah biaya untuk kluster ini sebesar Rp. 1.652.510.000 dalam menjalankan operasi daruratnya seperti terlihat tabel di bawah ini :

Tabel 24
Kebutuhan Personil dan Peralatan Kluster Kesehatan

No	Jenis Kebutuhan	Standar	Kebutuhan	persediaan	Kekurangan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Obat dan bahan habis pakai	30% / org	3,889	1,000	2.889	paket	75.000	216.675.000
2	Obat spesialis	10% /org	1,296	1,000	296	paket	110.000	32.560.000
3	Stetoscope	10/posko	100	20	80	set	100.000	8.000.000
4	Tensimeter	2/posko	20	10	10	set	200.000	2.000.000
5	Minor surgery	1/posko	10	-	10	Paket	20.000	200.000
6	Senter	2/posko	20	-	20	bh	20.000	400.000
7	Batrei	2/posko	20	-	20	dus	50.000	1.000.000
8	Tenda	1/posko	10	-	10	bh	4.500.000	45.000.000
9	Cairan infus	50/posko	500	-	500	bh	50.000	25.000.000
10	Genzet	1/posko	10	-	10	bh	5.000.000	50.000.000
11	Jas hujan	2/posko	20	-	20	bh	150.000	3.000.000
12	Sepatu bot	2/posko	20	-	20	pasang	75.000	1.500.000
13	Feelbad	20/posko	60	30	30	Bh	150.000	4.500.000
14	Masker	20/posko	200	-	200	dus	100.000	20.000.000
15	Sarung Tangan	-	3000	10000	2000	pasang	5.000	10.000.000
16	Tabung oksigen	2/posko	10	-	10	set	7.500.000	75.000.000
17	Alat suntik	50/posko	500	-	500	set	5.000	2.500.000
18	BBM	-	2,000	-	2,000	liter	6.500	13.000.000
19	Tenaga supir	-	6	3	3	bh	75.000	225.000
20	Dokter umum	-	6	4	2	org	100.000	200.000
21	Kantung darah	-	28	-	28	bh	250.000	7.000.000
22	Nasi bungkus(3x makan)	-	40	-	40	bks	20.000	8.000.000
23	Intensif Perawat dan Dokter	-	10	-	10	org	75.000	7.500.000
24	Kursi roda	-	6	-	6	bh	1.500.000	2.500.000
25	Tim gerak cepat	-	25	-	25	org	250.000	516.660.000
26	Ambulan	-	3	-	3	bh	200.000.000	600.000.000
Jumlah								1.652.510.000

3. KLASTER PENYELAMATAN DAN PERLINDUNGAN

Koordinator : Kodim 0309 Solok

a. Situasi

Terjadi bencana longsor pada pukul 00.00 wib – 05.00 wib secara bersamaan di 3 Kecamatan yaitu Kubung, X Koto Diatas dan Lembah Gumanti. Bencana longsor tersebut menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda, untuk meminimalisir jatuhnya korban lebih besar perlu segera dilakukan tindakan evakuasi terhadap masyarakat dan korban, persiapan personil dan peralatan dan pendukung lainnya dioptimalkan dalam penanganan bencana longsor. Dalam hal ini membutuhkan personil yang terlatih dan cakap, terutama dalam bidang penyelamatan dan perlindungan korban untuk proses tanggap darurat yang dilakukan secara bersamaan, perlu juga dilakukan penyelenggaraan korban meninggal agar pencemaran lingkungan bisa segera diantisipasi.

b. Sasaran

- 1) Tergeraknya sumber daya yang ada untuk melakukan pencarian dan perlindungan korban.
- 2) Terlaksananya proses pencarian dan evakuasi korban bencana dan tersedianya jalur evakuasi
- 3) Pencegahan terhadap berkembangnya korban lebih banyak serta prioritas pelayanan dan perlindungan terhadap kelompok rentan (anak-anak, wanita, lansia dan kelompok berkebutuhan khusus
- 4) Terinventarisasinya kerugian dan korban yang ditimbulkan
- 5) Terselenggarakannya jenazah korban bencana yang layak dan bermatabat.
- 6) Adanya laporan perkembangan situasi secara berkala

c. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan pada kluster penyelamatan dan perlindungan antara lain :

Tabel. 25
Kegiatan Kluster Penyelamatan dan Perlindungan

No	Kegiatan	Pelaku/ Institusi	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Kajian cepat	BPBD, TNI, Polri, Dinas Sosnakertrans, Dinkes, Dinas PU, Satpol PP, Tagana, Pramuka, PMI, LSM, PLN, Orari, RAPI, Perguruan Tinggi	Polri	1x6 jam setelah kejadian bencana
2	Pencarian dan pertolongan korban	BPBD, TNI, Polri, Dinas Sosnakertrans, dinkes, Dinas PU, Satpol PP, Tagana, Pramuka, PMI, LSM, PLN, Orari, RAPI, Perguruan Tinggi kemudian masyarakat dunia usaha	TNI	1X6 Jam setelah kejadian lapangan 7 hari setelah terjadi bencana
3	Penyelenggaraan jenazah	Kemenag, BPBD, Dinkes, Dinas PU, PMI, Dinas Sosnakertrans, TNI, Polri, RSUD, Pramuka, Tagana, LSM, komunitas masyarakat	Dinas Sosnakertrans	Selama 7 hari setelah kejadian bencana

d. Proyeksi kebutuhan

Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh kluster penyelamatan dan perlindungan, jumlah personil dan peralatan yang dibutuhkan, maka di proyeksikan jumlah biaya untuk kluster ini sebesar Rp. 1.669.975.000 (Satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam menjalankan operasi daruratnya seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 26
Kebutuhan Personil dan Peralatan Kluster Penyelamatan dan Perlindungan

No	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tabung Oksigen	5	-	5	buah	4,000,000	20,000,000
2	Kompas (Merk suntu)	5	-	5	buah	250,000	1,250,000
3	Peta tapografi(jamptop-AD)	350	-	350	buah	25,000	8,750,000
4	Motor trail (kawasaki 250cc)	10	2	8	buah	45,000,000	360,000,000
5	Rescue truck	2	-	2	buah	1,600,000	3,200,000
6	Rescue car	2	-	2	buah	400,000,000	800,000,000
7	Ambulance	20	10	10	buah	4,000,000	40,000,000

8	Sepatu Boat	25	-	25	buah	75,000	1,875,000
9	Jas.hujan	25	-	25	buah	150,000	3,750,000
10	Sarung tangan	100	-	100	buah	10,000	1,000,000
11	Tali,carmantel 10,5 mm 1 rool (200 m)	2	-	2	buah	7,000,000	14,000,000
12	Tali Carmantel 10,5 mm 1 rool (100 m)	2	-	2	buah	4,000,000	8,000,000
13	Tali Carmantel10,5 mm 1 rool (50.m)	4	-	4	buah	2,000,000	8,000,000
14	Full body harness	5	-	5	buah	4,000,000	20,000,000
15	Seat harness	5	-	5	buah	3,000,000	15,000,000
16	Senjer	30	-	30	buah	80,000	2,400,000
17	Lampu sorot	5	-	5	buah	1,000,000	5,000,000
18	Tandu	10	-	10	buah	1,000,000	10,000,000
19	Kantong mayat	60	-	60	buah	150,000	9,000,000
20	Perahu karet	4	-	4	buah	30,000,000	120,000,000
21	Perahu dolpin	5	-	5	buah	4,000,000	20,000,000
22	Life jacket	4	-	4	buah	40,000,000	160,000,000
23	Ascender Handel	5	-	5	buah	1,250,000	6,250,000
24	GPS	5	-	5	buah	6,500,000	32,500,000
Jumlah							1,669,975,000.

4. KLASER TRANSPORTASI

Koordinator : Dinas Perhubungan dan Kominfo

a. Situasi

Salah satu dampak dari bencana longsor yang terjadi di 3 Kecamatan secara bersamaan adalah tertimbunnya beberapa jalan di Kecamatan yang terkena longsor oleh tanah, sehingga menghambat kelancaran transportasi. Kelancaran transportasi sangat diperlukan terkait dengan kelancaran bantuan yang masuk ke daerah relokasi, maka perlu di upayakan perbaikan dan pengadaan sarana transportasi, informasi dan komunikasi agar kebutuhan selama penanganan darurat bencana bisa terpenuhi terutama untuk pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan dasar.

b. Sasaran.

- 1) Terjaminnya kelancaran proses bantuan masuk ke daerah pengungsian
- 2) Terjaminnya kelancaran proses evakuasi korban luka-luka ke tempat posko kesehatan agar mendapat pertolongan pertama dan perawatan
- 3) Terdistribusinya logistik dengan aman dan merata kepada seluruh pengungsi
- 4) Terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi, serta data yang lengkap, berupa alat angkut dan sarana angkutan jalan dan personil yang di butuhkan dalam kegiatan tanggap darurat.

c. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan pada kluster transportasi antara lain

Tabel. 27
Kegiatan Kluster Transportasi

No	Kegiatan	Pelaku/ Institusi	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Kajian cepat	BPBD, TNI,Polri, Dinas Sosnakertrans, Dinkes, Dinas PU, Satpol PP, Dishabkominfo, LSM, dunia usaha	Dishubkominfo	1x6 jam setelah kejadian bencana
2	Pendistribusian Logistik	BPBD, TNI,Polri, Dishabkominfo,dinas Sosnakertrans, Dinas PU, Satpol PP, Tagana, Pramuka, PMI, LSM, PLN, Orari, RAPI, Perguruan Tinggi kemudian masyarakat	Dinas Sosnakertrans	Selama 1 bulan setelah ditetapkan status darurat bencana

d. Proyeksi kebutuhan

Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh kluster transportasi, jumlah personil dan peralatan yang dibutuhkan, maka di proyeksikan jumlah biaya untuk kluster ini sebesar Rp. 205.425.000 (Dua ratus lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam menjalankan operasi daruratnya seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 28
Kebutuhan Personil dan Peralatan Kluster Transportasi

No	Jenis kebutuhan	Satuan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kesenjangan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Truk (sewa 30 hari)	Unit /hari	6	1	5	30.000.000	150.000.000
2	BBM truk	liter	7200	0	7200	5500	39.600.000
3	Pick up	Unit. / hari	3	3	-	-	-
4	BBM Pick up	liter	1800	0	1800	5500	9.900.000
5	Sepeda motor	liter	6	6	-	-	-
6	BBM sepeda motor	liter	450	0	450	6500	2.925.000
7	Personil dan awak kendaraan	orang	30	-	30	100.000	3.000.000
Jumlah							205.425.000

5. KLASSTER LOGISTIK

Koordinator : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a. Situasi

Terjadinya bencana longsor pada pukul 00.00 wib – 05.00 wib secara bersamaan di 3 Kecamatan (Kubung, X Koto Diatas dan Lembah Gumanti) di perkirakan waktu penanganan darurat adalah selama 30 hari, dari kejadian tersebut 3 Kecamatan yang terkena longsor akan membutuhkan bantuan dari luar, baik dari Kota / Kabupaten lain yang tak terkena dampak, pihak swasta maupun dari propinsi. Penerimaan dari seluruh bantuan, baik untuk pemenuhan kebutuhan dasar maupun untuk kebutuhan lainnya akan di koordinir oleh klaster logistik. Pemenuhan kebutuhan dasar tidak saja untuk korban yang mengungsi tapi juga untuk semua personil yang terlibat dalam penanganan darurat dengan asumsi jumlah kebutuhan personil dari evakuasi harian. Disamping itu pula juga diperkirakan perlindungan berbasis gender

b. Sasaran

- 1) Tersedianya tenda dan tempat penampungan sementara
- 2) Tersedianya kebutuhan dasar pengungsi serta terpenuhinya dukungan logistik yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tanggap darurat.
- 3) Tersedianya personil, sarana dan prasarana yang di butuhkan dalam penerimaan dan penyaluran bantuan
- 4) Tersedianya mekanisme kerja yang baik, teratur dan tearah, yaitu tersedianya pemenuhan kebutuhan dasar dan pendistribusian bantuan
- 5) Terdatanya jumlah, jenis dan asal bantuan yang diterima oleh seluruh instansi/lembaga
- 6) Tersedianya gudang logistik
- 7) Tersedianya dapur umum
- 8) Tersedianya penerangan pada area pengungsian

c. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh kluster logistik antara lain

Tabel. 29
Kegiatan Kluster Logistik

No	Kegiatan	Pelaku/ Institusi	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Kajian cepat	BPBD, TNI,Polri, Dinas Sosnakertrans, Dinkes, Dinas PU, Satpol PP, Dishubkominfo, LSM, Dunia Usaha, Disdikpora, Dinas Pertanian, Kesbang pol, Tagana, Dishutbun, Orari, Rapi,Komunitas Masyarakat.	Dinas Sosnakertrans	1x6 jam setelah kejadian bencana
2	Pendirian Posko Bantuan	BPBD, TNI,Polri, Dishabkominfo,Dinas Sosnakertrans, Dinas PU, Satpol PP, Tagana, Pramuka, PMI, komunitas masyarakat	BPBD	1X12 jam setelah status darurat bencana dikeluarkan
3	Pendirian Dapur Umum	BPBD, Dinas sosnakertrans, TNI,POLRI, Tagana, PMI, Pramuka, Komunitas masyarakat, LSM	Dinas Sosnakertrans	1x6 jam setelah status darurat bencana dikeluarkan
4	Penyiapan Gudang Logistik	BPBD, TNI, Polri, Dinas PU, Dishubkominfo, satpol pp, komunitas masyarakat, LSM	BPBD	1X12 jam setelah status darurat bencana dikeluarkan

d. Proyeksi kebutuhan

Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh kluster logistik, jumlah personil dan peralatan yang dibutuhkan, maka di proyeksikan jumlah biaya kluster ini sebesar Rp.5.171.307.000,- (lima milyar seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh ribu rupiah) dalam menjalankan operasi daruratnya seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 30
Kebutuhan Personil dan Peralatan Kluster Logistik

No	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	Makan non beras						
1	Sardensis	7.365	1.800	5.565	kg	5.000	27.825.000
2	Kecap botol	2.455	480	1.975	btl	3.500	9.912.500
3	Sambal botol	2.455	480	1.975	btl	3.500	9.912.500
4	Minyak goreng	2.455	30	2.425	btl	15.000	36.375.000
5	Mie instan	34.470	1.500	32.970	bks	2.500	82.425.000
6	Makanan siap saji	2.455	170	2.285	pkt	90.000	205.650.000
7	Nasi bungkus	9.821	-	9.821	bks	10.000	98.210.000
	Kebutuhan makanan harian						
8	Beras	100.000	27.000	73.000	kg	9.000	657.000.000
	Kebutuhan sandang						
9	Kain sarung	2.455	50	2.405	lbr	60.000	144.300.000
10	Kain panjang	2.455	50	2.405	lbr	45.000	108.225.000
11	Kaos krah	1.227	50	1.177	lbr	35.000	41.195.000
12	Daster	1.227	80	1.147	lbr	40.000	45.880.000
13	Kemeja	1.227	-	1.227	lbr	75.000	92.025.000
14	Selimut	1.227	100	1.127	lbr	35.000	39.445.000
15	Seragam SD laki2	303	75	228	lbr	60.000	13.680.000
16	Seragam SD perempuan	455	75	380	lbr	60.000	22.800.000
17	Family Kids	75	48	27	pkt	250.000	6.750.000
18	Keet ware	2.455	40	2.415	pkt	400.000	966.000.000
19	Food ware	2.455	24	2.431	pkt	350.000	850.850.000
	Peralatan makan dan dapur						
20	Tempat nasi	2.455	60	2.395	bh	40.000	95.800.000
21	Teko	2.455	60	2.395	bh	50.000	119.750.000
22	Panci	2.455	62	2.393	bh	45.000	107.685.000
23	Sutel	2.455	60	2.395	bh	10.000	23.950.000
24	Rantang susun	2.455	36	2.419	bh	80.000	193.520.000
25	Sendok nasi	2.455	60	2.395	bh	7.500	17.962.500
26	Kompore	2.455	20	2.435	bh	75.000	182.625.000
27	Wajan	2.455	72	2.383	bh	45.000	107.235.000
28	Minyak tanah	9.821	-	9.821	ltr	4.500	44.194.500
	Perlengkapan tidur						
29	Matras	4.911	70	4.841	bh	75.000	363.075.000
30	Hunian penduduk	29.463	-	29.463	M2	-	-
	- Tenda pleton	40	10	30	bh	5.000.000	150.000.000
	-Tenda regu	41	11	30	bh	5.000.000	150.000.000
	-Tenda keluarga	45	10	35	bh	2.500.000	87.500.000
	-Terpal uk. 4x6	45	20	25	lbr	180.000	4.500.000
	-Terpal uk. 8x12	203	-	203	lbr	350.000	71.050.000
	Jumlah.....						5.171.307.000

6. KLASSTER SARANA DAN PRASARANA

Koordinator : Dinas Pekerjaan Umum

a. Situasi

Apabila terjadi bencana longsor secara bersamaan di 3 Kecamatan yang rawan bencana yaitu Kecamatan Kubung, X Koto Diatas dan Lembah Gumanti dengan jumlah Nagari terkena dampak sebanyak 3 Nagari, maka masyarakat akan menyelamatkan diri ketempat yang aman. Hal ini menyebabkan kondisi rumah penduduk, fasilitas kritis (jalan, jembatan, jaringan air PDAM, jaringan PLN, sarana kesehatan) fasilitas umum (pasar tradisional,sekolah,rumah ibadah) dan kantor Pemerintahan rusak atau tidak bisa di pahami sementara sehingga membuat aktifitas masyarakat dan penanganan darurat bencana sedikit terhambat. Kerusakan fasilitas umum dan fasilitas krisis ini harus segera ditangani dan pulihkan

Data proyeksi kemungkinan kerusakan fasilitas umum dan fasilitas krisis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Jalan yang terancam adalah sepanjang 30.370 M
- 2) Jembatan yang terancam 58 M
- 3) Rumah ibadah yang terancam 30 Unit
- 4) Dari seluruh sekolah, maka sekolah yang terancam sehingga menghalangi proses belajar mengajar adalah 16 Unit
- 5) Pelanggan PLN terancam sebanyak 1832 Unit
- 6) Sarana kesehatan puskesmas pembantu yang terancam sebanyak 4 Unit
- 7) Pasar tradisional yang terancam sebanyak 1unit
- 8) Kantor pemerintahan yang terancam sebanyak 6 unit

b. Sasaran

- 1) Tersedianya air bersih dan perlengkapannya
- 2) Tersedianya rumah ibadah
- 3) Tersedianya MCK
- 4) Tersedianya sekolah untuk proses belajar mengajar
- 5) Tersedianya kendaraan alat-alat berat
- 6) Tersedianya alat-alat galian
- 7) Tersedianya alat angkut material
- 8) Tersedianya jembatan-jembatan darurat
- 9) Tersedianya alat angkut alat berat

c. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh klaster sarana dan prasarana antara lain :

Tabel. 31
Kegiatan Kluster Sarana dan Prasarana

No	Kegiatan	Pelaku/ Institusi	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Kajian cepat	BPBD, TNI,Polri, Dinas Sosnakertrans,Bapeda, Dinkes, Dinas PU, Satpol PP, Dishabkominfo, LSM, Dunia Usaha, Disdikpora, dinas pertanian, PMI Kesbangpol,Tagana, Dishutbun, Orari, Rapi, PDAM,Komunitas masyarakat.	Dinas PU	1x6 jam setelah kejadian bencana
2	Pemulihan Sarana Penerangan	PLN	PLN	1X24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan
3	Pemulihan jaringan komunikasi	BPBD, TNI, Polri Telkom, Orari,Rapi, PMI, Dishubkominfo	Telkom	1x6 jam setelah status darurat bencana ditetapkan
4	Pemulihan sarana air bersih	PDAM, Komunitas masyarakat, TNI, Polri, PMI, Dinkes	PDAM	1 bulan setelah status darurat bencana ditetapkan
5	Pemulihan pasar tradisional	Dinas PU, Dinas Koperindag, Komunitas Masyarakat, TNI, Polri	Dinas PU	1 minggu setelah status darurat bencana ditetapkan
6	Pendirian tempat ibadah	TNI, Polri, Dinas PU,Kemenag, Komunitas Masyarakat, Dinas Sosnakertrans	Kemenag	3x24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan
7	Pendirian sekolah darurat	Disdikpora, Dinas PU, TNI, Polri, LPM, Tagana, Komunitas Masyarakat	Disdikpora	1 minggu setelah status darurat bencana ditetapkan
8	Pendirian tenda pengungsian	BPBD, TNI,Polri, LSM, PMI,Dissosnakertrans, Tagana, Pramuka, Disdikpora, Komunitas Masyarakat	BPBD	1X12 jam setelah status darurat bencana ditetapkan
9	Pendirian Huntara	BPBD, TNI,Polri, LSM, PMI,Dissosnakertrans, Tagana, Pramuka, Disdikpora, Komunitas Masyarakat	TNI	1 bulan setelah status darurat bencana ditetapkan
10	Pemulihan jalan	TNI, Polri, Dinas PU,Dishubkominfo,Satpol PP, Komunitas Masyarakat	Dinas PU	1x12 jam setelah kejadian bencana
11	Pemulihan jembatan	TNI, Polri, Dinas PU,Dishubkominfo,Satpol PP, Komunitas Masyarakat	Dinas PU	1x12 jam setelah kejadian bencana

d. Proyeksi kebutuhan

Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh klaster sarana dan prasarana, jumlah personil dan peralatan yang di butuhkan, maka di proyeksikan jumlah biaya untuk klaster ini sebesar Rp. 1.001.375.000 (satu milyar seratus juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam menjalankan operasi daruratnya seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel . 32
Kebutuhan Personil dan Peralatan Kluster Sarana Prasarana

No	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bak fiber	39	8	31	Bh	6.000.000	186.000.000
2	Operasional mobil tangki air	6	1	5	Bh	350.000	2.100.000
3	Drum	10	-	10	Bh	500.000	5.000.000
4	Ember	2.455	-	2.455	Bh	25.000	61.375.000
5	Gentong	2.455	-	2.455	Bh	5.000	12.275.000
6	MCK	195	-	195	Unit	750.000	146.250.000
7	Sekolah darurat	2	-	2	Unit	15.000.000	30.000.000
8	Operasional greder 3 hari	1	-	1	Ls	4.000.000	4.000.000
9	Operasional excavator 3 hari	1	1	-	Ls	4.000.000	4.000.000
10	Operasional bulldoser 3 hari	1	-	1	Ls	2.500.000	2.500.000
11	Cangkul	100	-	100	Bh	50.000	5.000.000
12	Skop	500	-	500	Bh	50.000	25.000.000
13	Linggis	100	-	100	Bh	50.000	5.000.000
14	Operasional dump truk 3 hari	2	-	2	Ls	2.000.000	4.000.000
15	Jembatan darurat	2	-	2	Unit	250.000.000	500.000.000
16	Intensif posko	50	-	50	Bh	75.000	3.750.000
17	ATK Posko induk	1	-	1	Bh	75.000	75.000
18	ATK Posko lapangan	6	-	6	Bh	75.000	450.000
19	Transportasi	50	-	50	Bh	50.000	2.500.000
20	Nasi bungkus	50	-	50	Bh	15.000	750.000
21	Patroli/jaga malam	18	-	18	Bh	75.000	1.350.000
Jumlah.....							1.001.375.000

e. Rekapitulasi Kebutuhan

Jika terjadi bencana longsor berdasarkan skenario yang telah disepakati dan longsor terjadi secara bersamaan di 3 Kecamatan yang ada di wilayah Kab. Solok, maka dana atau anggaran yang di butuhkan sebesar **Rp. 11.059.442.000,-** seperti terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel. 33
Rekapitulasi Kebutuhan Kluster

No	Klaster	Volume	Satuan	Kebutuhan (Rp)
1	Manajemen dan pengendalian	30	Hari	1.358.850.000
2	Kesehatan	30	Hari	1.652.510.000
3	Penyelamatan dan perlindungan	7	Hari	1.669.975.000
4	Transportasi	30	Hari	205.425.000
5	Logistik	30	Hari	5.171.307.000
6	Sarana prasarana	30	Hari	1.001.375.000
Jumlah				11.059.442.000

Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik pemerintah Kab. Solok, Pemerintah Kabupaten/ Kota tetangga, Pemerintah Pusat, Instansi-instansi terkait, lembaga-lembaga swasta, masyarakat, relawan dan lain-lain.

BAB VI

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Rencana Kontinjensi ini disusun bersama oleh Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang terkait dengan penanganan bencana, yang dikelompokkan dalam bentuk Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Renkon Kabupaten Solok , pada situasi dan kondisi bulan November 2014
2. Setelah selesai penyusunan, Rencana Kontinjensi ini akan ditandatangani oleh setiap Pimpinan Instansi yang terlibat dan dikukuhkan dengan Peraturan Bupati Solok
3. Aktivasi dari Rencana Kontinjensi ini menjadi Rencana Operasional pada saat terjadi bencana longsor yang dilakukan oleh Bupati, selaku pemegang komando pengendali operasi.
4. SKPD dan lembaga yang terlibat dalam pembuatan rencana kontijensi ini harus dapat mendorong pimpinan untuk menandatangani rencana kontijensi ini
5. Pemantauan situasi dan perubahan kondisi dilakukan setiap setahun sekali untuk pemutakhiran data dan informasi, guna penyesuaian isi dokumen kontijensi
6. Perlu dilakukan top exercise dari rencana kontijensi ini untuk dapat melihat sejauh mana koordinasi sistem komando tanggap darurat dalam menghadapi bencana dilakukan
7. Perlu dilakukan gladi dalam menghadapi bencana longsor untuk melihat sejauh mana fungsi koordinasi di lokasi terjadinya bencana
8. Masa berlaku rencana kontijensi ini selama 5 (lima) tahun, terhitung dari saat di legalisirnya dokumen ini.
9. Apabila hingga batas waktu yang direncanakan tidak terjadi bencana, maka Rencana Kontinjensi ini akan diperpanjang masa berlakunya.

BAB VII PENUTUP

Demikianlah Rencana Kontinjensi ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Jumlah anggaran biaya yang ditimbulkan dari beberapa sektor dalam penanganan bencana bukanlah sebagai Daftar Isian Kegiatan tetapi adalah proyeksi kebutuhan apabila terjadi bencana. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat, serta Pemerintah Kabupaten/Kota tetangga, instansi-instansi vertikal, lembaga-lembaga swasta, masyarakat, relawan dan lain-lain.

Kami menyadari bahwa dokumen rencana kontijensi ini barangkali masih perlu penyempurnaan dan review secara berkala untuk memutakhirkan data yang ada, sehingga masukan yang membangun akan sangat diharapkan dari semua pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Solok.

Arosuka, 30 Desember 2014
BUPATI SOLOK

Drs. H. SYAMSU RAHIM

LAMPIRAN

Lampiran 1

Parameter Pengakhiran Status Darurat Bencana

Dalam rangka penanganan darurat bencana utamanya terhadap korban akibat bencana longsor yang terjadi, maka perlu diambil beberapa kebijakan agar semua korban dapat segera tertolong dan berbagai fasilitas serta infrastuktur dapat diperbaiki, sehingga nantinya semua aktifitas masyarakat dapat berjalan normal kembali. Namun karena belum ada kesepakatan pemerintah dalam hal ini kebijakan lama makatanggap darurat dan penghentian sttus darurat bencana, maka terlebih dahulu kiranya kita susun parameter untuk penghentian status darurat bencana. Dalam hal ini patokan atau rujukan yang di gunakan berdasarkan Perka BNPB Nomor 11 Tahun 2010.

Berikut merupakan beberapa parameter pengakhiran status darurat bencana yang secara spesifik menunjuk pada telah pulihnya fungsi unsur unsur atau aspek aspek yang terkena dampak bencana sebagai berikut :

Tabel. 34
Parameter Pengakhiran Status Darurat Bencana

Aspek yang ditangani		Parameter
Kehidupan		
1	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">➤ sudah dilakukan pencarian korban minimal 7 (tujuh) hari setelah kejadian➤ korban luka sudah di obati / mendapatkan perawatan medis➤ Korban sudah dikebumikan➤ Pengungsi sudah mendapatkan hunian sementara➤ Terpenuhinya kebutuhan pokok pengungsi seperti : makan, minum dan pakaian
Fasilitas Krisis		
1	Jalan	<ul style="list-style-type: none">➤ Jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan untuk penyaluran bantuan
2	Jembatan	<ul style="list-style-type: none">➤ Jembatan sudah bisa dipergunakan untuk penyeberangan baik pejalan kaki maupun kendaraan
3	Jaringan Listrik	<ul style="list-style-type: none">➤ Telah adanya aliran listrik untuk penerangan minimal malam hari dan penerangan jalan dan gedung / tempat peristirahatan

4	Jaringan komunikasi	➤ Jaringan komunikasi ke daerah terkena bencana telah berfungsi
5	Jaringan Air Bersih	➤ Kebutuhan air bersih sudah tersedia untuk MCK, makan dan minum
6	Sarana Kesehatan	➤ Tersedianya sarana pelayanan pengobatan, tenaga medis dan obat-obatan di masing - masing kecamatan terkena bencana.
Fasilitas Umum		
1	Kantor Pemerintahan	➤ Sudah berjalannya aktivitas pelayanan administrasi pemerintahan oleh pegawai setempat dari dan ke masyarakat
2	Pasar tradisional	➤ Aktivitas transaksi jual beli sudah berjalan kembali
3	Sekolah	➤ Adanya tempat belajar mengajar sementara ➤ 75% guru dan siswa sudah melaksanakan aktivitas belajar mengajar
4	Rumah ibadah	➤ Sudah dapat melaksanakan ibadah secara berjamaah dalam keadaan bersih dan layak pakai

Lampiran 2

PROFIL LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT DALAM PERENCANAAN KONTIJENSI

1.	Nama lembaga / instansi	
2.	Alamat Nomor Telepon Fax Email	
3.	Nama kontak person	
4.	Jabatan Nomor telepon / HP	
5.	Tugas pokok lembaga / instansi	
6.	Tugas dalam rencana kontijensi	
7.	Cakupan wilayah kerja	
8.	Kemampuan sumber daya yang dimiliki	a. Personal b. Sarana dan prasarana 1. 2. 3. 4.
	Kemampuan lainnya	

Koto Baru,

2014